

ABSTRACT

The filling of the vacancy in the position of regional head by the acting governor as a result of the postponement of the simultaneous national regional elections in 2024 raises problems related to the requirements, procedures, authority and legal basis which are used as the basis for filling the vacancy by the acting regional head. The aim of this research is to find out and analyze how the arrangements are made regarding filling vacancies for regional head positions in Indonesia and to analyze the filling of regional head positions in accordance with democratic principles. This research uses a normative juridical research method where the study of library law is carried out by examining library materials or mere secondary data. Then the collected materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that the filling of vacancies in regional head positions by acting regional heads (P.J) has been regulated by law, but these regulations still do not specifically regulate the requirements, procedures or authority of acting regional heads and there is a lack of community participation in the appointment of acting heads.

Keywords: *vacancy, acting, regional head*

ABSTRAK

Penundaan pilkada serentak nasional pada tahun 2024 menimbulkan permasalahan yang dimana penundaan pilkada mengakibatkan kekosongan jabatan di berbagai daerah sehingga perlu adanya tindakan yang diambil untuk mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah, adapun mekanisme yang digunakan yaitu dengan mekanisme pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah yang tentunya hal ini menimbulkan problematik terkait Mekanisme dan dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pengisian kekosongan jabatan oleh penjabat kepala daerah, serta kurangnya partisipasi yang melibatkan peran masyarakat dalam pengangkatan penjabat (PJ) kepala daerah sehingga mengurangi nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia dan untuk menganalisis pengisian penjabat kepala daerah sudah sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana studi hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengisian kekosongan jabatan kepala daerah oleh penjabat (PJ) kepala daerah telah diatur oleh undang-undang akan tetapi aturan tersebut masih belum mengatur secara spesifik terkait prosedur, kewenangan ataupun batas masa jabatan penjabat kepala daerah serta mekanisme pengangkatan penjabat yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat.

Kata kunci : kekosongan jabatan, penjabat, kepala daerah